

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hakekat pembangunan adalah transformasi atau perubahan dari suatu kondisi tertentu menuju suatu kondisi yang lebih baik. Dalam konteks kesejahteraan sosial pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu setiap perubahan yang menuju pada suatu keadaan yang lebih baik dapat dimaknai sebagai pembangunan. Perubahan tersebut dapat bersifat alamiah dan dapat pula karena direncanakan atau merupakan hasil rekayasa manusia¹.

Konsep pembangunan yang diterapkan pemerintah selama ini sepertinya belum mampu untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan itu sendiri. Dimana masih banyak masyarakat yang hidup miskin atau berada dalam kondisi tidak berdaya. Oleh karena itu paradigma pembangunan pun terus mengalami pergeseran dan perkembangan. Konsep pembangunan yang berkembang saat ini lebih menekankan pada pembangunan yang berpusat pada masyarakat yang dikenal dengan pemberdayaan (*empowerment*). Munculnya konsep pemberdayaan tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif untuk menyelesaikan masalah pembangunan yang di hadapi saat ini dan tujuan akhirnya dapat terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut *Chumber* pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat yang dikenal dengan

¹Chabib Soleh, *Dialektika Pembangunan Dengan Pemberdayaan*, Fokus Media, 2014, hlm. 1.

pembangunan manusia (*people centered development*), pembangunan berbasis sumber daya lokal (*resource based development*) dan pembangunan kelembagaan. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan tetapi merupakan subjek dari pembangunan itu sendiri².

Peternak di Indonesia khususnya peternak sapi perah merupakan salah satu komponen masyarakat yang masih berada pada posisi yang tidak berdaya. Ada beberapa faktor yang membuat peternak sapi perah tidak berdaya. Salah satu faktornya menurut Suradisastra adalah faktor arus pendekatan pembangunan selama ini yang lebih menempatkan peternak sebagai objek dan bukan sebagai subjek atau pelaku pembangunan. Hal ini menyebabkan tidak berkembangnya para peternak sapi perah. Akibat perencanaan yang bersifat sentralistis dan mekanistis serta seragam menyebabkan peternak dan kelembagaannya memiliki ketergantungan yang kuat pada proyek atau program pemerintah. Di sisi lain peternak dan kelembagaannya tersebut tidak mempunyai tanggungjawab dalam mengembangkan ide-ide baru yang lebih sesuai dengan kondisi setempat, sehingga kemandirian petani dan komunitas tidak berkembang³.

Kondisi peternak yang tidak berdaya tersebut mengakibatkan potensi subsektor peternakan sapi perah di Indonesia tidak berkembang secara maksimal. Padahal pembangunan subsektor peternakan dapat memenuhi 6 sasaran pokok yaitu meningkatkan pendapatan, memperluas lapangan kerja, menunjang program

²Totok Mardikanto, dkk, Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 25.

³Unang Yunasaf, Peran Kelompok Peternak Dalam Mengembangkan Keberdayaan Peternak Sapi Perah, Jurnal Penyuluhan, Vol. 04 No. 02, September 2008, hlm. 110.

konservasi tanah, menghemat devisa negara, meningkatkan produktivitas dan turut serta dalam program peningkatan gizi masyarakat⁴. Selain itu, sumber daya peternakan merupakan salah satu sumber daya penting bagi hajat hidup masyarakat dan memiliki potensi sebagai penggerak utama perekonomian nasional yang berbasis sumber daya lokal. Produk peternakan merupakan komoditas yang bernilai tinggi (*high value commodities*)⁵.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak, usaha peternakan dikelompokkan dari sektor hulu hingga sektor hilir. Sektor hulu berkaitan dengan sarana dan prasarana produksi peternakan seperti: pembibitan, industri pakan, obat-obatan, inseminasi buatan. Sedangkan sektor hilir yaitu kegiatan yang mengolah dan memperdagangkan hasil usaha ternak⁶.

Masih banyak permasalahan yang dialami para peternak mulai dari sektor hulu sampai sektor hilir tersebut. Permasalahan di sektor hulu antara lain produktivitas masih rendah, kurangnya ketersediaan bibit sapi perah, biaya pakan tinggi, skala pemilikan kecil dan mutu sumberdaya manusia masih rendah. Permasalahan di sektor hilir antara lain harga susu segar dan konsumen masih rendah serta harga jual pedet atau anak sapi perah tidak stabil⁷.

⁴Ellyza Nurdin, Manajemen Sapi Perah, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 4.

⁵Arief Daryanto, Dinamika Daya Saing Industri Peternakan, PT. Gramedia, 2009, hlm. Xix..

⁶F.G.Oley. J C, dkk, Kajian Pengembangan Ternak Sapi di Kecamatan Langowan Kaupaten Minahasa, Jurnal Agribisnis dan Pembangunan Masyarakat, Vol. 1 No. 2, Juli 2012. Hlm. 112.

⁷Siswanto Imam Santosa, Analisis Potensi Pengembangan Usaha Peternakan Sapi Perah Dengan Menggunakan Paradigma Agribisnis di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali, Jurnal Buletin Peternakan, Vol. 37 No. 2. Juni 2013. Hlm. 125-126.

Selama ini pemerintah lebih memperhatikan masalah pada sektor hilir sehingga mengabaikan masalah yang terjadi pada sektor hulu. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Pertanian bahwa kekurangan penyediaan berbagai produk peternakan menjadi tantangan sekaligus peluang dalam pembangunan peternakan nasional. Kedepannya pemerintah akan fokuskan di tingkat hulu agar produksi bertambah⁸. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian, Rusman Heriawan bahwa sudah saatnya pemerintah memperhatikan sektor hulu dari pengembangan sapi ternak, karena selama ini pemerintah lebih banyak mempermasalahkan sektor di hilir seperti harga yang mahal, hingga impor yang tinggi tapi tidak memperbaiki sektor hulunya⁹.

Berdasarkan pernyataan dari Menteri dan Wakil Menteri Pertanian tersebut dapat dilihat bahwa selama ini pemerintah lebih mementingkan masalah di sektor hilir sehingga permasalahan yang terdapat di sektor hulu diabaikan. Oleh karena itu, permasalahan yang terdapat di sektor hulu tersebut harus dituntaskan dan diselesaikan terlebih dahulu, dikarenakan sektor hulu merupakan akar dan masalah utama yang dihadapi langsung oleh peternak. Sektor hilir tidak akan berkembang jika masalah di sektor hulu belum diselesaikan atau dituntaskan secara keseluruhan. Jadi dalam penelitian ini peneliti lebih menfokuskan untuk melihat pemberdayaan peternak sapi perah di sektor hulu.

⁸Koran Jakarta.com, 2017, 22 Juni, Kementan FokusPerbaiki Sektor Hulu, www.koran-jakarta.com/kementan-fokus-perbaiki-sektor-hulu. Diakses 1 April 2019, pukul 10:00 WIB.

⁹Berita Bahasa.com, 2013, 28 Oktober, Fokus pada Sektor Hilir, Abaikan Masalah di Sektor Hulu. www.berita2bahasa.com/fokus-pada-sektohilir-aaikan-masalah-di-hulu. Di akses 1 April 2019, pukul 10:10 WIB.

Akibat diabaikannya sektor hulu mengakibatkan Indonesia terjebak pada aktivitas impor yang cukup tinggi pada berbagai produk peternakan, termasuk susu sebagai produk yang dihasilkan sapi perah. Susu merupakan salah satu produk peternakan yang bernilai tinggi dan mempunyai protein yang cukup tinggi. Namun dibandingkan negara ASEAN lainnya, konsumsi susu perkapita Indonesia masih rendah. Rata-rata konsumsi susu nasional masyarakat Indonesia 17,2 kg/kapita per tahun. Sedangkan Singapura berada di urutan tertinggi yakni 48,6 kg/kapita, disusul Malaysia yang konsumsinya berada di 36,2 kg/kapita, lalu Thailand 33,7 kg/kapita, serta Myanmar yang sekitar 26,7 kg/kapita¹⁰.

Meskipun tingkat konsumsi susu masyarakat masih rendah produksi susu dalam negeri belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Data Kementan terbaru menunjukkan, produksi susu segar dalam negeri masih rendah. Impor susu cukup tinggi hingga 80%¹¹. Ini berarti produksi susu yang dihasilkan peternak hanya mampu memenuhi sekitar 20% kebutuhan nasional. Oleh karena itu, peneliti mengasumsikan untuk meningkatkan jumlah produksi susu yang rendah serta volume impor yang masih tinggi perlu dilakukan pemberdayaan peternak di sektor hulu. Salah satu caranya yaitu meningkatkan populasi sapi perah dengan memperhatikan masalah pembibitan, sarana dan prasarana peternakan, obat-obatan, serta kesehatan hewan milik peternak.

¹⁰Detik Finance, 2017, 08 Agustus, Konsumsi Susu RI Lebih Rendah Dibanding 4 Negara ASEAN Ini. <http://finance.detik.com/industry/konsumsi-susu-ri-lebih-rndah-dibanding-4-negara-asean-asean-ini>. Diakses Pada 3 Juli 2019 Pukul 2:30 WIB.

¹¹Kumparan.com, 2018, 4 Juli, Data Kementan Terbaru: 80% Produk Susu Segar Masih Impor, <https://kumparan.com/data-kementan-terbaru-80%-produk-susu-segar-masih-impor>. Diakses Pada 3 Juli 2019 Pukul 2:52 WIB.

Selama ini penyebaran populasi sapi perah belum merata di seluruh daerah di Indonesia, dimana populasi sapi perah masih terpusat di Pulau Jawa. Padahal Pulau Jawa sudah sangat padat sehingga kawasan untuk peternakan sapi perah ikut berkurang. Upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengembangkan kawasan peternakan sapi perah di luar Pulau Jawa, salah satunya di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 830/Kpts/RC.040/12/2016 Tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional menetapkan Sumatera Barat sebagai lokasi pengembangan kawasan pertanian nasional komoditas prioritas peternakan kawasan sapi perah di luar Pulau Jawa yang tersebar di tiga kabupaten/kota yaitu Tanah Datar, Padang Panjang dan Bukittinggi.

Namun dari tiga kabupaten/kota tersebut Kota Padang Panjang mempunyai potensi yang lebih besar. Kota Padang Panjang memiliki iklim sejuk dan merupakan daerah dataran tinggi sehingga Kota Padang Panjang cocok dijadikan sebagai kawasan pengembangan sapi perah. Sapi perah yang umumnya dipelihara di Indonesia adalah sapi FH. Sapi FH membutuhkan daerah pemeliharaan dengan tinggi 600-1300 m dpl, dengan suhu 15°C-22°C, agar ia dapat berproduksi optimum. Oleh karena itu, peternakan sapi perah mutlak di tempatkan di daerah yang berudara sejuk¹².

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang menyatakan bahwa sapi perah merupakan produk unggulan pertanian Kota Padang Panjang, karena

¹²Ellyza Nurdin, Op.cit., hlm. 17.

sudah menjadi sentra produksi susu sapi perah di Sumatera Barat¹³. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa sapi perah merupakan salah satu produk unggulan sektor pertanian di Kota Padang Panjang, dikarenakan Kota Padang Panjang merupakan sentra peternakan sapi perah di Sumatera Barat. Hal tersebut didukung dengan potensi daerah Kota Padang Panjang yang berada di dataran tinggi serta beriklim sejuk, sehingga cocok untuk pengembangan sapi perah.

Meskipun Kota Padang Panjang mempunyai potensi yang cukup besar sebagai lokasi sentra pengembangan sapi perah namun populasi sapi perah di Kota Padang Panjang belum stabil. Berikut gambaran populasi sapi perah provinsi Sumatera Barat menurut kabupaten/kota pada tahun 2013-2017:

Tabel 1.1
Populasi Sapi Perah Provinsi Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota
Pada Tahun 2013-2017

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
A	KABUPATEN					
1	Kep.Mentawai	0	0	0	0	0
2	Pesisir Selatan	0	0	0	9	0
3	Solok	258	14	15	9	3
4	Sijunjung	0	5	6	0	0
5	Tanah Datar	168	102	109	69	42
6	Padang Pariaman	14	13	14	52	29
7	Agam	187	123	159	167	216
8	Lima Puluh Kota	7	18	19	28	47
9	Pasaman	0	0	0	0	0
10	Solok Selatan	0	21	21	16	17
11	Dharmasraya	104	0	0	0	0

¹³Sumbar antara news.com, 2014, 13 November Produksi Susu Sapi Perah Padang Panjang 900 Liter/Hari, <https://antaranewssumbar.com/produksi-susu-sapi-perah-padang-panjang-900-liter-hari>. , Diakses Pada 18 Juni 2019, Pukul 10:00 WIB.

12	Pasaman Barat	0	0	0	0	0
B	KOTA					
1	Padang	74	40	42	66	60
2	Solok	0	0	0	0	0
3	Sawahlunto	44	20	22	10	2
4	Padang Panjang	200	264	382	401	341
5	Bukittinggi	18	44	47	47	41
6	Payakumbuh	27	11	11	26	32
7	Pariaman	0	0	0	0	0
	SUMATERA BARAT	1.101	675	847	891	830

Sumber: BPS Sumatera Barat Tahun 2014-2018

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Kota Padang Panjang merupakan kota yang paling banyak populasi sapi perahnya di Sumatera Barat jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya. Namun populasi sapi perah di Kota Padang Panjang dari tahun 2013-2017 menunjukkan angka yang tidak stabil. Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 populasi sapi perah yang ada di Kota Padang Panjang mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2017 populasi sapi perah menunjukkan penurunan yaitu dari 401 ekor pada tahun 2016 turun menjadi 301 ekor pada tahun 2017.

Populasi yang belum stabil tersebut di sebabkan peternakan sapi perah yang ada di Kota Padang Panjang masih tergolong peternak rakyat dengan skala kepemilikan yang kecil. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Bidang Peternakan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang berikut ini :

“... sejak tahun 1981 peternak sapi perah di Kota Padang Panjang jatuh bangun karena peternak masih tergolong peternak rakyat, dimana satu KK hanya punya satu dua sampai empat ekor sapi perah...”
(Wawancara dengan Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, Bapak Wahidin Beruh pada tanggal 5 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Peternak sapi perah di Kota Padang Panjang semenjak tahun 1981 sampai sekarang masih tergolong kepada peternak rakyat. Dimana kepemilikan sapi oleh peternak relatif kecil yaitu satu KK hanya punya satu sampai empat ekor sapi saja. Masalah terkait populasi yang belum stabil dan skala kepemilikan yang kecil tersebut menunjukkan pentingnya pemberdayaan peternak sapi perah pada sektor hulu. Karena untuk meningkatkan populasi dan kepemilikan sapi milik peternak perlu tersedianya bibit yang berkualitas, ternak yang sehat, dan sarana prasarana peternakan yang lengkap serta adanya bantuan modal dari pemerintah.

Populasi sapi perah yang tidak stabil tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap produksi susu yang dihasilkan. Berikut produksi susu sapi perah di Kota Padang Panjang Pada Tahun 2013-2017:

Tabel 1.2
Produksi Susu Sapi Perah di Kota Padang Panjang
Pada Tahun 2013-2017

Tahun	Produksi/Liter
2013	246.286
2014	294.736
2015	621.180
2016	572.220
2017	521.730

Sumber: Kota Padang Panjang Dalam Angka 2018

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa produksi susu sapi perah di Kota Padang juga belum stabil. Pada tahun 2013 sampai 2015 produksi susu sapi perah mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2013 produksi susu 246.286 liter meningkat menjadi 294.736 liter pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 kembali meningkat menjadi 621.180 liter. Namun pada tahun 2016 produksi susu menurun

menjadi 572.220 liter dan pada tahun 2017 kembali menurun menjadi 521.730 liter. Ini menunjukkan bahwa peternak sapi perah Kota Padang Panjang belum mampu untuk meningkatkan populasi sekaligus produksi susu yang dihasilkan.

Pihak yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemberdayaan peternak sapi perah di Kota Padang Panjang adalah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang. Visi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang adalah Terwujudnya masyarakat tani yang amanah, aman, dan sejahtera serta katahanan pangan yang tangguh melalui agribisnis dan agroindustri yang berwawasan lingkungan. Sedangkan Misinya adalah:

1. Meningkatkan kualitas SDM petugas dan petani.
2. Mengembangkan komoditi unggulan daerah.
3. Mengembangkan teknologi budidaya, panen, pasca panen dan pemasaran hasil pertanian.
4. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan tani.
5. Meningkatkan kesadaran petani dan masyarakat terhadap pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat.
7. Mengembangkan kawasan utama ternak unggul yang ditetapkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
8. Meningkatkan produksi ternak dan konsumsi pangan asal hewan.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang



Sumber: Renstra Dinas Pangan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang pada Gambar 1.1 yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk pemberdayaan sapi perah di Kota Padang Panjang yaitu Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang terdiri atas tiga seksi yaitu, Seksi Produksi Peternakan, Seksi Sarana Prasarana Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet. Selain Bidang Peternakan pemberdayaan peternak sapi perah juga menjadi wewenang dari Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan, yang terdiri dari Seksi Penyuluhan dan Seksi Kelembagaan Tani. Sedangkan pemberdayaan peternak sapi perah terkait pelayanan kesehatan ternak menjadi wewenang dari UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Pembiitan Ternak.

Pemberdayaan peternak adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk meningkatkan kemandirian,

memberikan kemudahan dan kemajuan usaha serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan peternak. Pemberian kemudahan meliputi¹⁴:

- a. Pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi.
- b. Pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknik.
- c. Penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- d. Pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antarpelaku usaha.
- e. Penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau peningkatan kewirausahaan.
- f. Pengutamaan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri.
- g. Pemfasilitasan terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan.
- h. Pemfasilitasan pelaksanaan promosi dan pemasaran.
- i. Perlindungan harga dan produk hewan dari luar negeri.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan dilapangan pengetahuan peternak sapi perah yang ada di kota padang panjang masih relatif rendah. Masih kurangnya pengetahuan peternak terkait manajemen pemeliharaan dan manajemen pembibitan. Dapat dilihat dari tingginya tingkat kematian anak sapi milik peternak yang ada di Kota Padang Panjang. Akibatnya hampir setiap tahun dilakukan pembelian bibit sapi perah baru ke Jawa Barat atau daerah lain. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Peternakan Kota Padang Panjang yang mengatakan bahwa:

¹⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak Tahun 2013.

“...sumber daya manusia peternak kita tergolong masih rendah. Terutama masalah pembibitan, hanya sebagian peternak yang mampu melakukannya. Ini menyebabkan tingkat kematian anak sapi cukup tinggi. Hal ini terjadi ketika susu laku dipasaran peternak mengurangi jatah minum susu anak sapi. Seharusnya anak sapi diberikan susu sekitar 6 liter sehari peternak hanya memberi 1 liter saja dan itu juga dicampur dengan air biasa. Sehingga gizi dan pertumbuhan anak sapi tersebut kurang bagus”. (Wawancara dengan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bapak Wahidin Beruh pada tanggal 5 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa sumber daya manusia peternak sapi perah yang ada di Kota Padang Panjang masih tergolong rendah. Terutama terkait dengan masalah pembibitan, dimana hanya sebagian peternak yang mampu melakukannya. Padahal pembibitan ini merupakan hal yang sangat penting. Tanpa adanya bibit sapi perah yang berkualitas maka akan sulit meningkatkan populasi sapi perah yang ada di Kota Padang Panjang.

Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang sebagai pihak yang bertanggung jawab dan mempunyai wewenang untuk mengembangkan peternakan sapi perah di Kota Padang Panjang telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia peternak. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang telah memberikan dan memfasilitasi peternak untuk mengikuti beberapa kegiatan pelatihan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Peternakan:

“...untuk meningkatkan sdm peternak kami telah memberikan pelatihan dan juga pembinaan kepada peternak terkait manajemen pemeliharaan, mulai dari pemeliharaan anak sapi, pemberian pakan, dan juga manajemen kesehatan sapi perah. Selain itu peternak juga kami fasilitasi untuk mengikuti magang dan juga studi banding ke berbagai daerah”. (Wawancara dengan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bapak Wahidin Beruh pada tanggal 5 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia peternak sapi perah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang telah memberikan pelatihan dan juga pembinaan kepada peternak. Pelatihan dan pembinaan ini terkait manajemen pemeliharaan mulai dari pemeliharaan anak sapi, cara memberikan pakan yang berkualitas, dan juga bagaimana cara menjaga kesehatan pada hewan ternak. Selain memberikan pelatihan dan pembinaan peternak juga difasilitasi untuk mengikuti magang dan juga studi banding ke berbagai daerah.

Selain pengembangan sumber daya manusia peternak pengembangan kelembagaan kelompok juga harus diperhatikan. Pengembangan usaha peternak akan jauh lebih efektif dilakukan melalui kelompok. Karena dengan berkelompok peternak mempunyai kekuatan yang lebih besar untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama. Hal ini seperti disampaikan oleh Soetomo bahwa masyarakat Lokal secara mandiri perlu meningkatkan kapasitasnya untuk mendorong perubahan termasuk dalam alokasi power, sumber daya dan terutama posisi tawarnya. Apabila dilakukan secara sendiri-sendiri posisi tawar mereka akan sangat rendah. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya sikap dan tindakan kolektif dalam meningkatkan posisi tawar tersebut¹⁵. Selain itu, melalui kelompok pemberdayaan peternak juga lebih efektif dan efisien untuk dilakukan. Dimana Pemerintah dapat melakukan pemberdayaan kepada peternak dengan jumlah lebih banyak dalam satu waktu tertentu.

¹⁵Soetomo, Pemberdayaan Masyarakat, Pustaka Pelajar, 2011, hlm 91.

Untuk mengetahui bagaimana kondisi kelembagaan kelompok peternak sapi perah di Kota Padang Panjang peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan yang menyatakan bahwa:

“Peternak sapi perah di Kota Padang Panjang tergabung kedalam kelompok. Sampai saat sekarang ada 9 kelompok peternak sapi perah. Pada awal kelompok di bentuk semua persyaratan sudah terpenuhi, anggota terdiri dari 15-20 orang dan juga ada ketua, sekretaris dan bendaharanya. Tetapi dalam perkembangannya banyak anggota yang mundur. Kami dari Pemerintah Daerah sudah menyampaikan kepada peternak untuk merevisi dan menambah anggota lagi”. (Wawancara dengan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bapak Wahidin Beruh pada tanggal 5 Oktober 2018)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat dilihat bahwa peternak sapi perah di Kota Padang Panjang tergabung ke dalam kelompok. Dimana sampai saat sekarang terdapat 9 kelompok peternak sapi perah. Pada saat dibentuk semua kelompok sudah memenuhi persyaratan sebagai sebuah kelompok. Namun dalam perjalanannya banyak anggota kelompok yang mundur sebagai anggota kelompok. Untuk mengatasi masalah tersebut Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang telah melakukan pembinaan dan menyampaikan kepada peternak supaya mereka menambah anggota kelompok kembali.

Berdasarkan fenomena dan hasil wawancara tersebut peneliti berasumsi bahwa kesadaran peternak sapi perah yang ada di Kota Padang Panjang untuk melakukan usaha secara berkelompok masih rendah. Ini mengakibatkan tidak tercapainya inovatif, keberlanjutan dan tidak berjalannya fungsi dan peran kelompok ternak dengan baik. Padahal dengan berkelompok usaha yang dilakukan akan lebih mudah dan kelompok dapat dijadikan sebagai sarana untuk belajar, berdiskusi, dan memecahkan masalah yang dihadapi secara bersama-

sama. Selain itu upaya Dinas Pangan dan Pertanian relatif masih kurang. Dimana dinas hanya menginstruksikan kepada peternak untuk merevisi anggota kelompok, namun kenyataan dilapangan menunjukkan peternak belum melaksanakannya.

Selain masalah sumber daya manusia yang masih rendah, kelembagaan kelompok yang masih lemah peternak sapi perah di Kota Padang Panjang juga terkendala masalah modal. Untuk mengetahui bagaimana kondisi modal peternak sapi perah di Kota Padang Panjang peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut:

“Pada umumnya peternak sapi perah di Kota Padang Panjang masih terkendala dengan modal. Biasanya kami memberikan modal kepada peternak bukan dalam bentuk uang tetapi langsung dalam bentuk barang atau kebutuhan untuk mendukung produksi peternak, seperti sapi, kandang, mesin perah, alat untu pemotong rumput, tempat susu sapi perah yang higienis”. (Wawancara dengan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bapak Wahidin Beruh pada tanggal 5 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dilihat bahwa peternak sapi perah di Kota Padang Panjang pada umumnya masih terkendala dengan modal. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah Kota Padang Panjang khususnya Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang memberikan bantuan modal kepada peternak berupa bantuan sarana dan prasarana berupa ternak, kandang, peralatan-peralatan. Bantuan modal tersebut diharapkan dapat menjadi stimulan, perangsang dan pemupukkan modal untuk petenak sapi perah di Kota Padang Panjang sehingga pada akhirnya mereka dapat mengembangkan usaha mereka secara mandiri.

Selain memberikan bantuan modal dalam bentuk peralatan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang juga telah membangun sarana dan prasarana

peternakan. Melalui program peningkatan produksi hasil peternakan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang mendirikan tempat pembibitan ternak yaitu reuring unit. Reuring Unit diharapkan dapat mengatasi tingkat kematian anak sapi peternak yang relatif masih tinggi serta memberikan keringan terhadap modal pemeliharaan yang besar. Ini merupakan program subsidi langsung pemerintah ke peternak dengan pembesaran anak-anak sapi milik peternak. Pemerintah menyediakan susu, rumput, konsentrat untuk anak sapi. Pemerintah memelihara selama 18 bulan dengan catatan dan diharapkan anak sapi tersebut sudah bunting selama tiga bulan ketika dikembalikan ke peternak. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang:

“...kami belajar dari pengalaman ketika peternak itu sendiri yang membesarkannya, anak sapi tersebut tidak dapat diharapkan untuk mengganti indukan standar. Selain itu program ini juga untuk mengurangi beban peternak. Karena peternak hanya membayar setengah dari biaya pembesaran dari usia tujuh hari sampai bunting tiga bulan ketika dikembalikan lagi ke peternak”. (Wawancara dengan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bapak Wahidin Beruh pada tanggal 5 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang melalui Reuring Unit ini telah membantu dan memudahkan peternak. Karena adanya subsidi sekitar 50 persen dari total pembiayaan anak sapi dari usia tujuh hari sampai sapi bunting 3 bulan ketika dikembalikan kepada peternak. Sehingga peternak tidak terlalu terbebani dengan modal usaha pemeliharaan yang tinggi tersebut. Selain itu program ini juga dapat menekan tingkat kematian anak sapi milik peternak sehingga peternak juga dapat terhindar dari kerugian serta dapat menghasilkan kualitas sapi yang bagus.

Terkait latar belakang yang telah dipaparkan di atas dapat di lihat bahwa masih banyak masalah dan kendala yang di hadapi oleh peternak sapi perah di Kota Padang Panjang. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi peternak tersebut Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang sebagai pihak yang mempunyai daya sekaligus sebagai pihak yang mempunyai wewenang telah melakukan upaya pemberdayaan. Oleh karena itu untuk melihat upaya-upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang peneliti tertarik untuk mengkaji “Pemberdayaan Peternak Sapi Perah Oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang”.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Strategi Pemberdayaan Peternak Sapi Perah Oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Strategi Pemberdayaan Peternak Sapi Perah Oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi dalam mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan Administrasi Publik, karena di dalam penelitian ini terdapat kajian-kajian Administrasi Publik, yaitu pemberdayaan. Selain itu

penelitian ini juga dapat menambah referensi dan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemberdayaan Kelompok Tani Ternak Sapi Perah di Pemerintah Kota Padang Panjang ataupun Kabupaten/Kota lainnya yang ingin mengembangkan sektor peternakan sapi perah.

